MENCARI JATIDIRI "DI ANTARA"

BERNHARD KIESER SJ

"Meng-antara" adalah tugas pokok teologi. Dalam bentuknya yang asli, "teo"-"logi" adalah pewartaan yang membuat "Allah ber-bicara" dan dengan demikian membuat *Allah masuk dalam komunikasi kita.* Dan kalau dipandang sebagai ilmu, teologi harus memperdebatkan dan mencari kesetujuan, mengapa suatu pernyataan tertentu tentang Allah dan tentang karyaNya dapat diterima sebagai ungkapan iman sejati. Tugas teologi pada pokoknya ialah "meng-antarai".

> "Secara normatif dan eksemplaris, Kitab Suci menggariskan suatu proses dasar yang mengantarai Sabda Allah yang mewahyukan diri ke dalam dunia budaya dan alam budi manusia tertentu, yang diwarnai pola bicara dan berpikir tertentu, sesuai dengan situasi konkret dari gereja di daerah tertentu atau malahan situasi jemaat tertentu. Demikian pula setiap teologi harus secara kreatif mengantarai warta kristiani ke dalam saat sejarah sekarang ini. Kalau tugas dasar teologi adalah mengantarai pewahyuan yang asli ke dalam masa sekarang ini, maka teologi harus menjalankan tugas yang beraneka-ragam itu dengan saksama. Teologi menjalankan tugas pelayanan itu tidak sendirian: sebab proses yang mengantarai wahyu itu termasuk tatanan dasar gereja. Sebab iman kristiani hanya dapat hidup dalam wujud sosial gereja yang beraneka-bentuk, misalnya pewartaan, ibadat dan diakonia dan juga dalam pelayanan kepemimpinan gereja." (K. Lehmann)

Kalau proses yang mengantarai wahyu itu termasuk tatanan dasar gereja[1], maka gereja dan teologi seharusnya dijiwai oleh keprihatinan dasar yang satu ini: *Supaya usaha mengantarai* itu *mengena pada "ala-*

matnya"! Supaya injil menjadi hidup manusia! Supaya Allah dijumpai dalam hidup gereja dan mulai bicara lagi dalam hidup orang! Menurut pengalaman banyak orang, Allah sedemikian absen dari hidup gereja yang makin kaku dan administratif, sehingga makin banyak orang menantikan kehadiran-Nya melalui tanda-tanda ajaib.[2] Apa – yang menghambat proses untuk mengantarai itu, sehingga Sabda Allah kurang menyentuh pengalaman manusia dewasa ini? Apakah hanya karena mereka yang bertugas menjadi "pengantara" tidak lagi dijiwai oleh keyakinan rasuli atau bahkan tidak lagi jujur dalam iman mereka? Apakah hanya karena gereja (entah siapa itu) terlalu ekklesiosentris dalam praktek hidup dan dalam teologi? Dan kalau benar bahwa di lain zaman usaha mengantarai itu lebih berhasil – *mengapa dewasa ini begitu sulit*?

Mengantar pada Misteri Kristus

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mungkin terjawab semata-mata oleh kateketik atau oleh semacam teologi pewartaan, seakan-akan dengan membalik metode pewartaan menjadi katekese umat kita sudah pada jalan yang tepat untuk "melayani Sabda bagi umat dan yang cocok dengan situasi dan lokasinya".[3] Mengubah metode belum tentu memperlancar komunikasi; sebab usaha untuk mengantarai itu menyangkut jatidiri gereja. "Mengantarai" pada dasarnya berarti *"introductio in mysterium Christi"*. Bagaimana orang yang hidup secara bertanggungjawab dalam lingkungan sosial-budaya konkret, menjadi terlibat dalam sejarah penyelamatan yang memuncak dalam Kristus dan yang aktual dalam pergumulan sejarah pembebasan dan perdamaian dewasa ini? Atau – dengan melihat peristiwa sejarah keselamatan dari perspektif lain: bagaimana Sabda yang adalah "Ya" ilahi, terungkap satu kali untuk selama-lamanya dalam Kristus, menjadi panggilan yang menyentuh dan membuka hati manusia dewasa ini? Bagaimana sejarah per-janji-an baru dapat berlangsung sekarang ini juga, sehingga orang mendengar janji Allah dalam bahasa mereka sendiri, dan menantikan pemenuhan dengan sepenuh hati? Sebab iman kristiani bukan kepercayaan buta akan hal-hal yang sulit dipahami melainkan "ketaatan iman ..." sehingga "manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, dengan mempersembahkan >kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan< dan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikurniakan olehNya." (DV no. 5) Orang beriman secara kristiani, kalau ia *mengenal Sabda Allah* dengan *budi peka* dan kalau dengan sepenuh hati *ia mengandalkannya*

sedemikian rupa, sehingga menjadi awal baru dalam hidup orang yang "tahu kepada siapa aku percaya". Bagaimana Sabda Allah diantarai, sehingga "mendorong semua ... untuk mencari kebenaran" dan untuk "berpegang teguh pada kebenaran ... dan untuk mengatur seluruh hidup mereka menurut tuntutan kebenaran"? (DH no. 2)

> "Bagi Gereja penting lah menampilkan sekarang ini, seperti telah dijalankannya pada periode-periode lain sejarahnya, kebijaksanaan Injili, keberanian dan kesetiaan dalam menyelidiki maupun menempuh secara operasional metode-metode baru dan perspektif-perspektif baru bagi pendidikan katekese." (Catechesi Tradendae, no. 17)

Pewartaan yang mengantarai ini menjadi masalah khas dan runcing dalam hal "mengajar *iman* yang *harus dipercaya* dan *diterapkan dalam hidup*". Para "pewarta iman (yang mengantarkan murid-murid baru kepada Kristus") menghadapi pertanyaan teologi fundamental mengenai pengantaraan iman itu secara khusus, kalau "dalam masalah-masalah yang diperdebatkan oleh para ahli etika dan oleh para teolog moral" mereka ingin mengemukakan "asas-asas ajaran moral yang berdasarkan Kitab Suci dan tradisi hidup rasuli dan menunjuk pada pengandaian-pengandaian dan konsekuensi-konsekuensi dalam pandangan-pandangan yang menentang ajaran itu". (VS no. 5) Sebab kalau menyangkut kelakuan dan praksis hidup, keyakinan (juga keyakinan iman) diantarai dan diteruskan kepada orang terutama *melalui kaidah-kaidah* yang diterima dalam masyarakat, dan yang terbentuk terutama untuk menata hidup bersama menurut nilai-nilai yang ingin dijamin dan diteruskan. Maka orang yang terutama memperhatikan inspirasi injili yang menjiwai praksis, akan menekankan, bahwa kaidah moral dalam lingkungan orang kristiani mendapat dasarnya pada Kristus, pada pewartaan-Nya dan wafat serta kebangkitan-Nya yang menyelamatkan; di lain pihak, orang yang terutama menguraikan seluk-beluk praksis iman itu akan lebih memperhatikan, bagaimana kaidah-kaidah injili dipertanggungjawabkan dalam penalaran etik.[4]

Sejak zaman Thomas dari Aquino, tradisi teologi moral yakin, bahwa kaidah-kaidah dipertanggungjawabkan dengan *recta ratio*. Ratio itu adalah penalaran "plausible", yang tidak pertama-tama menunjuk pada kebenaran-kebenaran abadi yang mau tidak mau harus diakui, melainkan mengikuti *langkah-langkah pemikiran praktis* yang masuk akal. Sejak zaman filsafat dan teologi skolastik abad pertengahan, tradisi moral katolik yakin, bahwa penalaran moral terarah untuk memperoleh kesetujuan dan untuk mencapai saling pengertian yang praktis,

dan bahwa orang dapat hidup bermoral sesuai dengan kaidah hanya kalau membina "prudentia" (kebijaksanaan) sebagai keutamaan pokok atau dasar. Orang bijaksana itu mahir untuk mengenal dan mengartikan kaidah universal dalam konteks hidupnya yang pribadi dan dalam konteks hidup unik orang lain. Berhubungan dengan masalah kaidah umum dan praksis hidup, teologi moral sejak lama membicarakan proses "mengantarai" itu. Mungkin beberapa hal yang kita ketahui dari tradisi moral, dapat berguna untuk makin memahami tugas gereja, yang membangun jatidiri dalam meng-antara-i.

Antara Kaidah dan Tindakan Hidup: Kebijaksanaan

Pertama-tama perlu dijelaskan sedikit, bahwa kaidah (norma) yang berlaku umum ***tidak secara langsung menentukan atau mengarahkan praksis***. Setiap orang tahu yang sudah barang tentu jelas: kendati kaidah diakui umum dan dipertahankan sebagai aturan universal, belum tentu menggerakkan dan mengarahkan praksis hidup. Kesenjangan antara aturan umum dan tindakan konkret belum cukup dapat diterangkan dengan kelemahan manusia yang sering tidak membuat apa yang ia yakini sendiri. Kesenjangan itu terdapat di antara kaidah yang baru menjadi nyata kalau berlaku umum, dan tingkah laku yang baru menjadi nyata kalau khusus dan unik. Supaya dapat berlaku umum, kaidah sedikit banyak lepas dari praksis dan oleh sebab itu berlaku "pada umumnya" (F. Böckle). Kaidah-kaidah mengikat kita, karena berlaku mutlak, yakni tanpa memandang situasi ini atau itu, dan tanpa mengandaikan kondisi tertentu. Maka, kalau senyatanya mau dijalankan dalam praktek, kaidah harus dikaitkan dengan tugas dan situasi tertentu, dan harus diisi serta sekaligus didamaikan dengan banyak kondisi hidup. Hanya orang yang tidak tahu hidup dapat mengharap, bahwa gerak hidup akan mengikuti aturan yang berlaku umum (kalau tidak, "celakalah hidup – umso schlimmer für die Tatsachen"!). Kondisi fisik dan situasi di benua-benua yang berbeda-beda, konteks historik dan keyakinan kultural, jaringan sosial dan konstelasi politik – semuanya ini menyebabkan, bahwa kaidah yang umumnya diyakini dan yang dipandang mutlak berlaku, tampil dalam wujud pelaksanaan yang beraneka-ragam. Sewajarnya demikian! Sebab lain "medan kenyataan" dari *kaidah-kaidah*, yaitu *ruang rasionalitas* komunikatif (untuk mencapai 'saling-mengerti'), lain "medan kenyataan" dari *perbuatan praktis*, yaitu *"ruang hidup"* atau jaringan hidup yang historis dan sosial.[5]

Keberlakuan umum dikaitkan dengan kenyataan praktik melalui suatu usaha kreatif, sekurang-kurangnya oleh kreativitas seseorang yang merangkum masalah khusus di bawah pengertian atau aturan umum. Dan belum tentu, bahwa di bawah terang kaidah yang sama, berkembanglah pengarahan-pengarahan yang selalu dan di mana-mana sama. Kita tahu hal itu dari banyak contoh dalam sejarah moral katolik sendiri – umpamanya: Kaidah untuk menghormati martabat manusia dikemukakan di mana-mana dan dipandang mutlak berlaku. Di alam pikiran religius abad yang lalu, dan dalam suasana politik yang serba liberalis dan anti-gerejani Eropa Barat abad 19, mereka yang mengemban tugas mengajar di gereja dan banyak teolog moral memerangi semua usaha untuk menegakkan hak-hak asasi, demi penghargaan akan martabat manusia, sebagai citra Allah; sedangkan dengan semangat dan pengertian yang tidak kalah tegas akan martabat manusia, citra Allah, paus dan uskup-uskup dewasa ini menuntut penegakan hak-hak asasi. Tidak usah kita menerangkan perubahan itu dengan liku-liku argumen; sebaiknya, perubahan diakui saja. Sebab tak ada kaidah yang umumnya berlaku yang menjadi hidup kalau belum "di-antarai" oleh suatu tindakan kreatif yang berakar dalam "ruang hidup" (E. Husserl: "Lebenswelt") dan yang tak dapat tidak menghasilkan pengarahan yang lain dari pada yang lain.

Dalam teologi moral, *"kebijaksanaan"* atau "kebijakan" mengantarai kaidah yang berlaku umum dari satu pihak dan kenyataan hidup. Kebijaksanaan itu bukan hanya suatu sikap subyektif, melainkan sekaligus – seperti dalam bahasa kita sehari-hari – berarti semacam "pengarahan praktis". Dapat dikatakan: "kebijaksanaan" adalah persepsi *kaidah umum dari sudut pandangan tugas dan kenyataan hidup.*[6] Sebab "kebijaksanaan" adalah semacam pedoman praktis, yang (dengan kurang lebih sadar akan kaidah umum) terbentuk oleh akal budi praktis berhadapan dengan tugas hidup. Praktek moral gerejani sering kali mengacu pada "kebijaksanaan" itu, umpamanya: Untuk menjamin kepentingan gereja dalam perkawinan di lingkungan budaya yang majemuk, ada sementara keuskupan yang mengambil kebijaksanaan untuk tidak melayani perkawinan campur, ada lain keuskupan yang mengambil kebijaksanaan untuk justru melayani perkawinan campur. Karena menanggapi kasus pastoral (dengan mengingat kepentingan orang perorangan – sacramenta sunt propter homines!), kebijaksanaan itu dipandang sebagai penyelesaian pastoral, dan penyelesaian pastoral itu dianggap tidak banyak berkaitan dengan pertimbangan moral. Andaikata memang demikian, moral menjadi teori

belaka dan pastoral dapat meng-izinkan segala sesuatu, tanpa kenal moral.

Ber-nalar Komunikatif

Di mana-mana kita jumpai kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti itu yang mesti bersifat konkret dan berubah-ubah, karena terbentuk berdasarkan pengalaman hidup yang beraneka-ragam, untuk menanggapi tugas hidup yang berbeda-beda. Namun kebijaksanaan itu tidak sama dengan petunjuk pelaksanaan semata-mata, melainkan punya arti moral sejati. Sebab justru waktu menghadapi tugas hidup, orang menemukan inti dan pokok kaidah moral. Pokok-pokok moral itu tidak seakan-akan sudah dipesan "dari atas" (entah oleh seorang atasan atau oleh akal budi yang universal) melainkan justru tampil sebagai cara yang masuk akal atau sebagai sikap dasar dalam menjalankan tugas kita. Ada pemikiran etik yang *berpangkal pada kaidah umum* – seperti pada umumnya etika yang berciri metafisik. Cara berpikir itu mencari kejelasan bagaimana norma umum *diantarai ke dalam pengertian praktik*. Namun juga ada etika sebagai ilmu praktik, yang *berpangkal pada kebijaksanaan* yang menanggapi tugas hidup konkret, dan yang dengan diskurs berusaha untuk *mempertanggungjawabkan* kebijaksanaan, me-nurut imperatif kategorik yang dirumuskan oleh I. Kant: "bertindaklah sedemikian rupa, sehingga kebijaksanaan yang kaupilih dapat menjadi dasar untuk perundangan yang umum".[7]

Masing-masing pendekatan punya kepentingan sendiri dan juga punya kesulitannya sendiri. Kaidah yang berlaku umum dapat menjadi pegangan mutlak yang universal dan tidak diragukan; namun justru karena yakin bahwa kaidah berlaku umum dan dengan sendirinya sudah jelas, orang sering tidak menyadari lagi tugas untuk mengantarainya ke dalam keterlibatan hidup. Tidak lagi ada usaha untuk mengantarai, dan kaidah umum dianggap sebagai kebijaksanaan yang cukup jelas dan tegas, yang dapat mengarahkan kelakuan kita. Atau sebaliknya, dengan semangat misioner yang berkobar-kobar, instansi pusat memaklumkan kebijaksanaan tertentu sebagai aturan abadi yang mengikat hati-nurani selalu dan di mana-mana, tanpa mengajak orang untuk ikut menyadari, bahwa kebijaksanaan itu memang patut "menjadi dasar untuk perundangan yang umum". Model-model mediasi seperti itu *menghindari usaha untuk mengantarai*; kita menjumpai model-model itu baik dalam usaha pemerintah untuk membina moral publik melalui perintah, penataran dan pengawasan oleh pusat (padahal, pengawasan

jauh lebih efektif, kalau bawahan mengawasi atasan dan daerah mengawasi pusat!), maupun juga dalam sementara praktek gerejani yang dengan otoritas ilahi menegaskan norma-norma universal dan mutlak. Umpamanya: Karena yakin bahwa perintah "jangan membunuh" sudah barang jelas dan diakui umum, orang dengan tegas menghukum segala bentuk abortus (karena dilarang oleh firman kelima!) dan tidak melihat, bahwa masalah nyata (umpamanya masalah seorang ibu yang hamil di luar nikah) bukanlah kewajiban mentaati firman kelima melainkan bagaimana mengambil sikap dalam keadaan terjepit. Supaya kaidah dapat berdampak, perlu diadakan pertimbangan konkret dan perlu dicari suatu cara kreatif yang meneguhkan ibu yang mengandung itu, supaya mampu bertahan melawan beranekaragam desakan yang menganjurkan "lebih baik menggugurkan". Tanpa usaha untuk mengantarainya dalam praksis hidup, kaidah yang paling tegas dan masuk akal pun tidak mungkin menjadi efektif, karena tidak kena pada hidup dan tidak mampu meneguhkan tanggungjawab. Demikian juga, kalau orang yakin harus menegaskan firman kelima disertai ancaman sanksi, mungkin disegani untuk sementara otoritasnya; namun ia mudah kehilangan wibawa, karena tidak menyentuh hidup. Dapat saja pembinaan moral mulai dengan kaidah umum dan tegas; namun perlu diadakan usaha komunikatif, yang melibatkan dia yang mengemukakan kaidah dengan hidup, dan yang melibatkan orang yang menghadapi masalah dengan kejelasan kaidah.

Kalau mulai dari kebijaksanaan hidup, pengantaraan nampaknya lebih sulit karena kebijaksanaan dengan sendirinya beranekaragam dan menyangkut banyak kepentingan yang belum tentu dapat didamaikan satu sama lain. Bagaimana beraneka kepentingan *dilibatkan dalam suatu kepentingan bersama*? Bagaimana kebijaksanaan yang banyak menjadi terpadu dalam satu usaha untuk memelihara perdamaian dan memajukan hidup manusia? Orang yang dalam tugas hidupnya telah menemukan pengarahan mesti mempertanggungjawabkannya dalam suatu jaringan komunikasi yang secara prinsipial tidak terbatas. Sebab orang hanya menemukan kesadaran diri, identitas kemerdekaannya dan perkembangan hidupnya kalau berusaha mengembangkan saling-mengerti dan kerja-sama. Kebijaksanaan hidup kita perlu dipertanggungjawabkan dalam penalaran komunikatif. Namun bila dalam suasana umum ditekankan betapa "pentinglah mencari identitasnya sendiri", orang cenderung *menghindari jerih-payah untuk bernalar di forum terbuka* dan enggan berdebat dengan jujur karena sulit mengandalkan itikad baik dari semua pihak. Dalam hidup gereja, kita

mengenal juga suasana itu, umpamanya di banyak diskusi mengenai inkulturasi yang diakhiri dengan menunjuk pada keunikan logika budaya setempat. Identitas yang luas diganti dengan rasa aman yang sempit.

Bagaimanapun jua: tidak boleh dilewati usaha untuk mengantarai kaidah umum ke dalam hidup melalui kebijaksanaan atau usaha untuk mengantarai kebijaksanaan hidup ke dalam kepentingan bersama melalui kaidah yang umumnya diakui. Sebab kaidah umum tidak menjadi real dan efektif kalau tidak dilibatkan dalam hidup – dan kebijaksanaan hidup tidak mengikat, kalau tidak dipertanggungjawabkan dalam rangka kepentingan bersama. Etika tidak boleh membatasi diri pada mengemukakan norma yang berlaku umum, sama seperti etika tidak boleh memutlakkan kebijaksanaan hidup. Dengan meng-klaim infallibilitas atas norma, usaha mengantarai hanya menjadi lebih sulit, sama seperti sikap serba tegas untuk membela kebudayaan unik. Usaha untuk "mengemukakan" dan "menjagai" kaidah yang sehat, umum dan mutlak, hanya merupakan satu unsur dalam tugas pembinaan moral; yang lain adalah jerih payah untuk mengantarai. Dan baru kalau keduanya ada, pembinaan moral mulai berdampak. Maka, kalau instansi universal amat menegaskan betapa mutlaklah berlaku kaidah universal, usaha mediasi itu makin mendesak.

Jemaat yang Komunikatif

Bagaimana mengantarai? Jawabannya tidak begitu mudah, karena kaidah umum diantarai ke dalam kenyataan hidup mesti *secara konkret, unik dan kreatif.* Untung, bahwa dalam "ajaran sosial gereja" kita punya semacam contoh gerejani bagi proses pengantaraan yang majemuk. Usaha-usaha yang menemukan kebijaksanaan dalam memperjuangkan keadilan diakui dan dipertanggungjawabkan oleh kuasa mengajar dengan ajaran resmi dalam ensiklik-ensiklik, dan ajaran mendapat dukungan dan wujud oleh praksis gereja di segala kawasan dunia. Mulai pertengahan abad yang lalu, ada banyak kelompok keterlibatan sosial dan kelompok perjuangan kaum buruh, yang tidak jarang dirintis oleh pastor-pastor, yang berpengalaman memperbaiki nasib orang buruh dan yang mengembangkan dan juga memasyarakatkan ajaran sosial gereja di beraneka lingkungan sosial-politik. Mengenai pedoman keterlibatan sosial, dikatakan oleh Paus Paulus VI bahwa "adalah tugas jemaat-jemaat kristen untuk menganalisa secara obyektif situasi negaranya sendiri, menyinarinya dengan terang injil yang tak pernah berubah

dan mengambil bahan pemikiran, norma-norma pertimbangan serta pedoman-pedoman tindakan konkret dari ajaran sosial gereja (*Octogesima adveniens* no. 4).[8]

Adalah tugas *jemaat setempat* untuk mengantarai; sebab sudah barang tentu, bahwa instansi pusat yang mengemban tugas untuk mengemukakan kaidah umum, tidak mungkin bicara dalam rangka keberlakuan universal dan sekaligus berpangkal dari konteks hidup konkret. Namun juga tidak boleh begitu saja diserahkan pada suara hati perorangan, bagaimana ia mengetrapkan kaidah umum. Hal itu jauh melampaui cakupan dan kemampuan suara hati, apalagi sebetulnya bukan masalah pengetrapan. Kaidah umum harus berdampak dan berbuah dalam hidup, supaya diatasi moral yang individualis-egois. Kaidah bukan petunjuk bagi suara hati yang bingung; juga bukan kisi-kisi bagi orang yang tidak tahan bertanggungjawab sendiri; kaidah adalah tantangan, supaya masing-masing melibatkan kecerdasannya untuk *saling-mengerti,* dan supaya melibatkan inisiatifnya demi kepentingan bersama. Orang membutuhkan kaidah karena mencari *saling-mengerti,* dan karena bersama-sama dengan rekan-rekannya mau melihat manakah tugas yang sekarang ini dihadapi dan manakah hal yang paling mendesak, yang mesti dilakukan. Moral, yakni tindakan yang senyatanya manusiawi adalah perbuatan komunikatif dalam rangka kebersamaan, dan kesulitan-kesulitan tindakan komunikatif[9] adalah kesulitan-kesulitan sejati bagi "konkretisasi moral".

Moral sebagai *tindakan komunikatif* sebetulnya bukan hal baru dalam *tradisi moral kristiani.* Semula moral kristiani bukan pemeliharaan (jangan ada orang kristen menyeleweng!) melainkan usaha misioner, agar dengan perbuatan orang beriman, sebanyak mungkin orang berpartisipasi dalam hidup Allah yang ingin memberikan Diri. Semula, moral orang kristen bukanlah ketegasan untuk mengatur hidup sendiri, melainkan ketekunan untuk membangun tubuh bagi Kristus yang bagaikan kepala melalui tubuhnya memenuhi segala-galanya. Semula moral kristiani tidak dipandang sebagai jalan untuk berjumpa dengan Allah – sebab orang yang diselamatkan hidup dari iman; semula diusahakan, agar dalam hidup bersama orang kristen berlaku apa yang satu kali untuk selamanya diawali dalam Kristus: bahwa Allah meninggikan orang lemah. Sampai dengan visi Santo Thomas dari Aquino mengenai keseluruhan teologi, moral bukanlah untuk menjamin keselamatan masing-masing orang kristen di akhirat (karena ia tidak melanggar di dunia ini), melainkan moral adalah semacam gerak keprihatinan untuk menghantar kembali segala ciptaan dan seluruh sejarah ke dalam

kemuliaan Allah. Terutama oleh karena itu, demi moral kristiani, kaidah umum baru senyatanya diantarai, kalau jemaat-jemaat kristiani makin saling-mengerti mengenai arti sejarah, dan kalau orang-orang beriman menggerakkan inisiatif mereka supaya makin banyak orang terlibat. Mengantarai kaidah berarti "melibatkan", dan hal itu adalah tugas jemaat; untuk itu ia hanya dapat mengandalkan itikad baik setiap anggota – indoktrinasi dan kecurigaan menggagalkan tugas pokok itu.

Lebih-lebih kalau kaidah umum ditegaskan demi tata tertib, orang mencari kebijaksanaan hidup dengan terang-terangan menentang aturan institusi. "Kebijaksanaan" seperti itu sedikit banyak masuk akal, kalau untuk menjadi diri, orang harus menentang paksaan institusional. Dalam suasana persaingan sulit mengantarai kaidah dan maksudnya; sulit juga, kalau jemaat setempat mendiamkan aturan umum dan mengatur hidupnya sendiri, di luar hubungan "ekumene". Maka orang yang (bertugas untuk) mengemukakan dan menerangkan kaidah, tidak boleh membatasi perhatiannya pada rumus dan (sedikit banyak) isi aturan; komunikasi termasuk tugas "magisterium".

Namun juga kalau kepemimpinan dijalankan dengan tepat dan wajar, juga kalau semua beritikad untuk membentuk kebijaksanaan dalam kebersamaan, tetap tinggal pertanyaan: bagaimana mengantarai kaidah yang menjadi keyakinan bersama dengan kebijaksanaan yang berasal dari ruang hidup yang begitu bervariasi? Memang, di alam budaya kita tetap berlaku, bahwa orang beragama dalam kebersamaan. Orang menjadi kristiani bila mengikuti acara doa di gereja, menghafal syahadat kristiani bagaikan semboyan dan mengakui beberapa kaidah yang gamblang (seperti: kasih pada sesama, jujur dan tidak korup) sebagai moral kristiani. Katanya, pandangan hidup cenderung religius-komunal. Namun bagi makin banyak orang, agama (termasuk agama kristiani!) tidak lagi mencakup segala-galanya; makin meluaslah daerah (seperti bisnis dan pendidikan) yang di luar cakupan agama; makin majemuklah kelompok orang yang hadir pada ibadat yang sama: ada orang dari establishment politik dan ada pejuang melawan ketidakadilan struktural; ada yang mengharapkan doa yang khusuk dan ada yang mengharapkan doa dengan gaya kharismatik; ada yang menantikan keakraban dan ada yang mau terlibat dalam perjuangan pembebasan; secara prinsipial semua mau mengikuti perayaan tobat di masa prapaska, namun sedikit sekali dapat menerima pengarahan resmi dalam keluarga berencana. Bagi mereka semua, agama kristiani (yang sering mereka pilih dengan sengaja dan yang dengan gigih mereka bela melawan tekanan lingkungan) tidak lagi merupakan pandangan dunia yang me-

nyeluruh, yang mempersatukan alam pikiran dan yang menjadi kerangka kepentingan bersama. Biarpun bersatu, kita *tidak lagi punya "tema" yang kita cita-citakan bersama.* Baik ensiklik paus maupun keputusan sinode keuskupan ataupun tema APP belum tentu dan dengan sendirinya mempersatukan. Bagaimana – di antara banyak kebijaksanaan dan di bawah payung kaidah moral kristiani yang universal – ditemukan tema yang mempersatukan kita dan yang menjawab kerinduan orang untuk hidup dalam keterpaduan?[10]

Cara kita Bertindak

"Ke mana pun kita melihat, tak pernah ada hidup tanpa aturan", kata Immanuel Kant. Dan menurut Kant, baik hidup alam maupun "penghayatan hidup kita" selalu sudah berlangsung menurut aturan, juga kalau aturan belum kita kenal atau kalau kita mengikuti aturan walaupun kita menyadarinya (umpamanya kalau bicara menurut tata bahasa kita). Kita hidup menurut hukum-hukum biologik, dalam lingkungan sosial yang teratur dan menurut kaidah-kaidah yang telah kita introyeksi. Namun, kalau "tak pernah ada hidup tanpa aturan", kaidah-kaidah moral tidak pernah bertemu dengan sang manusia pada dirinya, melainkan selalu menyapa orang yang sudah hidup dalam aturan sosial; demikian pula kebijaksanaan kita temukan justru dalam peluang yang dibuka oleh keteraturan sosial. *Moral* tidak mengajar manusia untuk tahu aturan atau untuk hidup teratur; bahkan sebaliknya, kaidah moral mengajak orang *untuk membina hidup bersama* yang sudah serba teratur itu menjadi *lebih manusiawi.*[11]

Kita tahu banyak contoh untuk hal itu, umpamanya: Dengan wejanganNya mengenai perkawinan (bdk. Mk 10, 1-9par) Yesus tidak menegur seorang yang menceraikan isterinya, melainkan berdebat dengan orang-orang farisi mengenai aturan perceraian. Sabda Yesus mempermasalahkan aturan; demikian juga setiap kaidah moral yang umum berhadapan dengan kebiasaan sosial, dengan aturan politik, dengan mode yang diresapkan ke dalam cita-cita hidup dan dengan tradisi yang sudah menjadi darah-daging. Dipermasalahkan dan – seperlunya – diubah aturan yang seakan-akan dengan sendirinya berlaku. Optimisme moral bahwa orang dapat hidup dan berjuang melawan arus sering dikaitkan dengan harapan naif, seakan-akan orang dapat hidup dan berjuang di luar konteks sosial. Namun dalam kenyataan, di lingkungan kebudayaan desa, himbauan supaya – umpamanya – perkawinan orang kristen diikat secara bebas, tidak kena sasaran, sama seperti dalam

lingkungan bisnis – umpamanya – himbauan untuk membayar gaji yang cukup atau penegasan agar jangan memakai uang pelicin.

Kaidah moral harus menuju *perubahan struktural.* Baru kalau demikian, para pejuang dapat juga mempermasalahkan: bagaimana, di tengah-tengah semua kebiasaan dan aturan itu, *mewujudkan hidup bersama secara lain*? Tak seorangpun dapat hidup di luar tata alam dan di luar tatanan sosial; maka, apakah cara hidup kita memberi ruang bagi setiap manusia dan dengan demikian menghargai dia sebagai sesama dan sebagai anak Allah? ataukah cara hidup kita malahan memojokkan atau mengucilkan? apakah cara hidup kita melibatkan sesama agar berpartisipasi? ataukah inisiatifnya malahan dicurigai dan dipersulit? Aturan manapun tidak dapat tidak menguntungkan mereka yang mampu dan sempat mentaatinya, dan mengasingkan mereka yang (entah karena alasan mana) tidak mampu mengikutinya. Maka kaidah moral menuntut supaya tata aturan ditinjau kembali: apakah aturan-aturan itu dapat disetujui oleh semua yang terlibat dan apakah akibat kelakuan kita dapat diterima oleh semua yang terkena? Moralitas diketahui pertama-tama dari prosedur yang ditempuh: apakah dalam penalaran senyatanya diikutsertakan (kepentingan) semua orang, tanpa kekecualian dan tanpa manipulasi? Kalau jujur, pertimbangan moral melibatkan kepentingan hidup semua orang, karena menguji aturan dengan memandang hakekat dan tujuan hidup sang manusia – artinya setiap manusia.

Moralitas prosedural sebetulnya *tidak jauh* dari *ajaran Yesus* dan *tradisi jemaat kristiani.* Kebiasaan hidup dan tata sosial nenek moyang ditinjau kembali dalam terang Kristus, yang dengan penyerahanNya memenuhi taurat. "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikan di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang." (Mt 20, 25-28) Dengan mengenangkan pro-eksistensi Kristus, dimaklumkan suatu kaidah untuk menata kembali stratifikasi sosial demi kepentingan orang yang sekarang ini terpaksa melayani. Perintah "supaya melayani!" dan perintah "supaya mendoakan musuh!" terus-menerus menggugat cara kita menata hidup bersama. Jangan sampai ada orang yang dikesampingkan! Jangan sampai dipakai kekerasan untuk menjamin keamanan. Dalam hal itu, moral orang kristiani

tidak hanya secara "kontrafaktis" mengandaikan, bahwa perbuatan manusia yang sejati sebetulnya untuk saling-mengerti; dalam moral kristiani tidak hanya secara "kontrafaktis" diandaikan bahwa sesama kita semua beritikad baik. Dalam moral kristiani diandaikan "defakto", bahwa yang dekat dan yang jauh dan yang bermusuhan senyata-nyatanya telah di-perdamaikan dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Demi Kristus kita membutuhkan suatu *moral prosedural:* suatu gaya bernalar dan suatu cara bertindak dalam jemaat, yang menampung kebijaksanaan hidup serta mengujinya dalam rangka kepentingan semua. Semoga usaha "meng-antarai" semacam itu menjadi jatidiri kristiani.

CATATAN

1. Bdk. Kunz, E., Kirche als Vermittlungsgestalt der Gnade, *Theo Phil* 57, 1982, 425-438.
2. Bdk. Zulehner, P.M., Ecclesiastical atheism, *JETh* 1 (1988), 5-20.
3. Pujaraharja, Bl., Pewartaan Baru dan Komisi Kateketik PWI, *Rohani* 36, 1989, hlm. 80.
4. Pelbagai dimensi pengantaraan etik disebut dalam Giers, J., Das Ethos der Norm. Sittlichkeit zwischen normativer und empirischer Erkenntnis, dlm.: Ernst, W. dll. (ed.), *Dienst der Vermittlung,* Leipzig 1977, 395-415.
5. Mengenai rasionalitas komunikatif dan "Lebenswelt", bdk. Habermas, J., *Theorie des kommunikativen Handelns II,* 182 dst.
6. Bdk. seterusnya: Krings, H., Norm und Praxis: Zum Problem der Vermittlung moralischer Gebote, *Herder-Korrespondenz* 45 (1991) 228-233.
7. Bdk. Habermas, J., Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu? dlm.: *Erläuterungen zur Diskursethik,* Frankfurt 1991, 9-30; dan: Motive nachmetaphysischem Denkens, dlm.: *Nachmetaphysisches Denken,* Frankfurt 1992, 42-47.
8. Jalan seperti itu ditempuh juga oleh keuskupan-keuskupan yang dalam satu atau lain bentuk menjalankan suatu proses sinodal untuk membentuk kebijaksanaan pastoral.
9. Mengenai "aporetik" dalam (teori) tindakan komunikatif: Arens, E., Kommunikative Rationalität und Religion, dlm.: *Erinnerung, Befreiung, Solidarität,* Düsseldorf 1991, 179-184.

10. Bdk. Zulehner, P.M., Auswahlchristen, dlm.: Pfammatter, J. – F. Furger (ed.), *Volkskirche – Gemeindekirche – Parakirche. Theologische Berrichte 10,* Zürich 1981, 109-137.

11. Mengenai paguyuban manusiawi sebagai kerangka dan tujuan moralitas: bdk. Apel, K.-O., Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik, dlm.: *Transformation der Philosphie Bd.2,* Frankfurt 1973; Lakeland, P., *Theology and Critical Theory. The Discourse of the Church,* Nashville 1990.